

PERANAN SUBSIDI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Penyunting:

Hariyadi, S.IP, M.P.P

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR RI

2010

Peranan Subsidi Terhadap Perekonomian Indonesia

Penyunting:

Hariyadi, S.IP, M.P.P

Penulis:

Ari Mulianta Ginting, SE, MSE

Eka Budiyantri, S.Si, MSE

Iwan Hermawan, SP, MSi

Sahat Aditua F Silalahi, ST, MBA

Edmira Rivani, S.Si, M.Stat

Rasbin, S.TP, MSE

Lisnawati, S.Si, MSE

Galuh Prila Dewi, SP, MSi

Rafika Sari, SE, ME

Sony Hendra Permana, SE, ME

Yuni Sudarwati, SIP, MSi

Cetakan Pertama, 2010

ISBN 978-602-8722-05-6

Diterbitkan Oleh:

Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI

Alamat Penerbit:

Gedung Nusantara I, Lt.2
Jl. Gatot Soebroto Jakarta Pusat 10270
Telp. 021 5715372

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kata Pengantar

Persoalan subsidi, khususnya dalam konteks sebagai bentuk campur tangan negara dalam perekonomian, sedikit banyak akan mengingatkan kita pada kritik peraih Hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2001, Joseph E. Stiglitz, terhadap globalisasi (Stiglitz, 2002). Kritik itu menjadi tamparan tidak hanya kepada negara-negara maju tetapi juga kepada rezim tata ekonomi global yang mereka bela habis-habisan selama ini.

Sebagai akademisi dan sekaligus mantan ketua Dewan Penasehat Ekonomi Amerika Serikat (AS) pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, ia mengajukan sebuah kontra-argumen terkait dengan fenomena globalisasi yang pada akhirnya mencengangkan mata dunia. Rezim tata ekonomi global, direpresentasikan oleh Bank Dunia dan IMF misalnya, yang secara filosofis bertugas mengelola perekonomian global sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kesejahteraan seluruh umat manusia ternyata telah melenceng dari ketika mereka didirikan. Serangkaian kebijakan IMF dan Bank Dunia dengan *one-fits-for-all approach*-nya dianggap tidak hanya telah mendistorsi upaya setiap negara berkembang dan tetapi juga sering didorong oleh motivasi politis dan idiologis. Keputusan-keputusannya lebih didasarkan pada formula yang berisi bauran idiologis dan dogma yang dibungkus secara samar-samar dengan berbagai kepentingan negara-negara maju. Stiglitz misalnya, secara terang-terangan mengkritik bahwa bahwa kebijakan-kebijakan IMF untuk sebagian sering didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru bahwa pasar dengan sendirinya mendorong sebuah hasil yang efisien, tidak mengijinkan adanya intervensi pemerintah, dan langkah-langkah lain yang dapat mengarahkan pertumbuhan ekonomi dan membuat setiap orang *better off*. Mereka menekan negara-negara miskin untuk menghapuskan berbagai penghalang tetapi mereka justru mempertahankannya, mencegah negara-negara berkembang mengeksport produk pertanian dan menekan mereka untuk menghilangkan sumber pendapatan dari ekspornya. Pendek kata, mereka mendorong agenda

globalisasi untuk menjamin bahwa mereka mendapatkan porsi keuntungan yang sangat besar dengan mengorbankan kepentingan negara-negara berkembang.

Bagi Stiglitz, kini saatnya rezim tata ekonomi global perlu menggabungkan kebijakan ekonomi dan filosofi yang memandang bahwa hubungan antara pemerintah dengan pasar sebagai pihak-pihak yang saling melengkapi, keduanya bekerja dalam kemitraan dan mengakui bahwa sementara pasar berada pada inti perekonomian, di sana juga harus ada, meskipun terbatas, peran penting pemerintah. Sebagai orang yang telah belajar banyak tentang kegagalan pasar, ia berkesimpulan bahwa tidaklah naif untuk menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban mengatasi setiap kegagalan pasar. Hal ini tidak berlebihan karena di situlah negara dapat memainkan perannya sebagai sebuah entitas legal dan politik yang berkewajiban untuk menegakkan fungsi dasarnya (Gilpin, 1981). Hal ini juga sejalan dengan pandangan teori *Welfare Economics*, di mana pemerintah harus berperan mengelola serangkaian fenomena kegagalan pasar, seperti monopoli alamiah, informasi yang tidak sempurna, eksternalitas, fenomena *the tragedy of the commons* dan kompetisi destruktif (Howlett and Ramesh, 1995: 28).

Stiglitz menegaskan bahwa globalisasi yang diartikan sebagai penghapusan segala penghalang perdagangan bebas dan integrasi secara penuh setiap perekonomian nasional dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan kebaikan umum dan berpotensi memberikan kesejahteraan bagi setiap orang, khususnya kaum miskin, di seluruh dunia. Namun demikian, cara pengelolaannya, termasuk di dalamnya perjanjian perdagangan internasional yang telah berperan besar dalam penghapusan segenap penghalang perdagangan dan kebijakan yang telah dipaksakan kepada negara berkembang selama ini, perlu ditinjau ulang secara radikal.

Dengan menganalogikan pada pemikiran di atas, buku ini akan mengupas salah satu aspek keterlibatan negara dalam perekonomian, yakni isu-isu yang terkait dengan subsidi. Subsidi merupakan salah satu kebijakan fiskal yang memiliki arti strategis dalam bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu unit usaha atau sektor ekonomi. Sebagai sebuah pilihan keterlibatan negara, perdebatan terhadap isu subsidi tidak hanya mencakup disain kebijakan apa saja yang seharusnya dirancang oleh pemerintah tetapi juga bagaimana subsidi itu bisa dikelola secara optimal. Hal ini tentunya diarahkan dalam rangka mencapai dua misi sekaligus, yakni di satu sisi subsidi dapat

menjadi wahana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sementara pada saat yang sama subsidi juga tidak membebani anggaran publik.

Secara tematik, sejumlah isu subsidi akan disajikan dalam buku ini dari sifatnya yang umum sampai pada bentuk-bentuk subsidi secara sektoral, seperti isu subsidi terhadap pajak, bahan bakar minyak dan energi non-bahan bakar minyak, tarif listrik, usaha kecil menengah, pupuk dan pertanian, perikanan, kesehatan, dan subsidi dalam bentuk transfer uang secara langsung.

Tulisan Ari Mulianta Ginting yang berjudul “Analisa Kebijakan Subsidi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” akan mengawali Bab I buku ini. Dengan pendekatan yang sifatnya kuantitatif, tulisan ini memfokuskan pada isu subsidi energi dan non-energi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan teknik analisa regresinya, penulis mendapati hasil bahwa subsidi energi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, subsidi energi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bab II memuat tulisan Eka Budiyaniti dengan berjudul “Analisis Rendahnya Penyerapan Subsidi Pajak di Indonesia”. Penulis memusatkan pada isu rendahnya penyerapan fasilitas pajak yang ditanggung pemerintah dan alternatif solusinya. Penulis mendapati sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran subsidi pajak ini, yakni aspek administratif, kriteria atau penilaian terhadap penerima, dan aspek teknis-birokratis. Dalam konteks perbaikan pelaksanaan kebijakan ke depan, pemusatan pada penyelesaian faktor-faktor di atas menjadi sesuatu yang patut dipertimbangkan pemerintah.

Bab III berisi tulisan Iwan Hermawan yang berjudul “Ekonomi Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Dampaknya terhadap Kinerja Perekonomian Indonesia”. Tulisan yang menggunakan pendekatan kuantitatif ini akan memusatkan pada isu subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan dampak kebijakan subsidi harga BBM terhadap kinerja perekonomian. Penulis berkesimpulan bahwa kebijakan kenaikan subsidi harga BBM memberikan dampak yang positif terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Adanya penurunan tingkat inflasi dan jumlah pengangguran, kenaikan ekspor bersih, peningkatan Produk Domestik Bruto, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengindikasikan hal ini. Namun demikian kebijakan kenaikan subsidi harga BBM tersebut harus dikaji lebih komprehensif sebagaimana tergambar dari kebijakan subsidi harga BBM yang telah dilakukan oleh negara-negara lain, seperti

Cina, India, Malaysia, Thailand, dan Sri Lanka, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan produsen.

Tulisan Sahat Aditua Fandhitya Silalahi yang berjudul “Insentif dan Subsidi Dalam Pengembangan Energi Non-Bahan Bakar Minyak” akan mengisi Bab IV. Tulisan ini akan memaparkan satu fenomena penyediaan energi nasional khususnya dari sumber minyak bumi, yakni indikasi bahwa permasalahan kelangkaan minyak bumi tidak hanya terjadi pada sisi produksi tetapi juga pada sisi permintaan. Penulis menyimpulkan bahwa dalam rangka memperkuat pengembangan energi, khususnya dari sumber energi non-BBM, pemerintah perlu mendisain kebijakan subsidi dan insentif yang sesuai dengan kondisi pengelolaan masing-masing sumber energi.

Tulisan berikutnya berjudul “Analisa Kebijakan Subsidi Dalam Tarif Listrik” dan ditulis oleh Edmira Rivani akan mengisi Bab V. Kajiannya akan memusatkan pada isu signifikansi subsidi listrik ke depan tidak hanya dari aspek disain kebijakan tetapi juga kelompok sasaran. Penulis menyimpulkan bahwa subsidi listrik di Indonesia masih diperlukan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu dan mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Dalam rangka kesinambungan listrik, penguatan kebijakan subsidi silang antar-pelanggan, kebijakan kenaikan tarif listrik seharusnya disesuaikan secara bertahap.

Bab VI berisi tulisan Rasbin dengan judul “Subsidi dan Upaya Peningkatan Daya Saing Ekspor Sektor UMKM”. Tulisan ini menyoroti membanjirnya produk-produk dari luar negeri terutama produk-produk asal Cina pasca-pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (CAFTA). Penulis menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara anggota ASEAN yang tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi pemberlakuan CAFTA. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan daya saing produk Indonesia, kebijakan subsidi perlu diagendakan khususnya pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah, sektor yang telah terbukti relatif tidak rentan terhadap krisis ekonomi global.

Bab VII akan diisi tulisan Lisnawati dengan judul “Proyeksi Implikasi Penurunan Subsidi Pupuk Terhadap Kesejahteraan Petani”. Fokus tulisan ini berkaitan dengan isu manfaat nyata subsidi pupuk dan sejauh mana masalah distribusi pupuk di daerah serta dampaknya bagi distribusi pendapatan petani apabila subsidi pupuk dikurangi. Penulis menyimpulkan bahwa Penghapusan subsidi secara langsung akan menyebabkan peningkatan beban ongkos produksi yang cukup besar bagi petani kecil, situasi yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap tingkat produksi secara umum. Namun demikian, ke-

bijakan subsidi dalam bidang ini perlu dievaluasi sebagaimana terlihat secara sosiologis bahwa peningkatan pendapatan terbesar petani bukan dari sektor pertanian sehingga terdapat korelasi yang lemah antara penyaluran subsidi pupuk dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani secara umum.

Bab selanjutnya, Bab VIII diisi oleh tulisan Galuh Prila Dewi dengan judul “Urgensi Subsidi Perikanan di Indonesia”. Dalam tulisan ini, isu disain subsidi perikanan menjadi sebuah pilihan kebijakan yang perlu mendapatkan keberpihakan pemerintah. Penulis menyimpulkan bahwa sektor perikanan di Indonesia berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Salah satu indikatornya adalah peningkatan produk kotor domestik, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Namun demikian, produktivitas nelayan Indonesia hingga saat ini tergolong masih rendah karena penggunaan armada perikanan yang secara nasional masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, daya tampung hasil tangkapan yang kecil, dan keterbatasan pemanfaatan dana perbankan. Dari kondisi seperti inilah, disain kebijakan subsidi mendapatkan tempatnya.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan demografis, isu pangan dipastikan akan menjadi agenda kebijakan publik yang tidak kalah menariknya dengan isu-isu lainnya. Rafika Sari dalam tulisannya yang berjudul “Polemik Subsidi Perumahan di Indonesia”, akan mengisi Bab IX. Penulis memfokuskan pada persoalan rendahnya penyerapan subsidi perumahan selama ini dan dampak yang mungkin timbul akibat adanya perubahan skema subsidi perumahan yang dilansir pemerintah. Penulis menyimpulkan bahwa Penyerapan subsidi perumahan di Indonesia selama kurun waktu 2008-2010 masih rendah. Faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan subsidi perumahan tersebut adalah krisis global, turunnya tingkat suku bunga yang berlaku, dan meningkatnya jumlah perumahan swadaya masyarakat dan pemerintah daerah. Diperkenalkannya skema baru, dikenal sebagai Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga menimbulkan polemik di berbagai pihak, baik dari masyarakat berpenghasilan rendah dan para pengembang. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan kerja sama antar-pemangku kepentingan dan penegakan hukum menjadi pekerjaan rumah pemerintah ke depan.

Bab berikutnya, Bab X akan diisi oleh tulisan Sony Hendra Permana. Tulisan yang berjudul “Bantuan Langsung Tunai sebagai Salah Satu Program Penanggulangan Kemiskinan” akan menyajikan isu yang terkait dengan persoalan *cash transfer*. Dalam kajiannya, penulis menyimpulkan bahwa meski-

pun penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) secara umum telah berjalan baik, sejumlah kendala masih dapat ditemui, seperti persoalan administrasi, teknis dan pendataan penerima BLT. Dengan demikian, sebagai saran penulis menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait dengan penyelesaian penentuan kriteria keluarga miskin dan perlu dipertimbangkannya kompensasi yang berbeda di setiap daerah.

Bab XI yang berisi tulisan Yuni Sudarwati berjudul “Sistem Jaminan Sosial Nasional: Alternatif Pendanaan Bidang Kesehatan” akan menjadi tulisan terakhir dalam edisi bunga rampai ini. Penulis memusatkan pada isu jaminan sosial dalam bidang kesehatan. Penulis mendapati fenomena bahwa program pemerintah yang dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) masih menemukan sejumlah kendala. Dengan demikian, ke depan perlu adanya reformulasi kebijakan pelaksanaannya. Pendek kata, pelaksanaan SJSN memerlukan persiapan yang matang. Hal ini mencakup, antara lain besaran iuran, cakupan peserta, sinergi antar-badan penyelenggara, peningkatan kapasitas masing-masing badan penyelenggara baik dalam sumber daya manusia, manajemen maupun teknologi informasi dan upaya peningkatan jaringan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat.

Buku ini tidak berpretensi menjadi salah satu kumpulan tulisan yang memuat terobosan mendasar dalam mengkaji isu-isu subsidi di Indonesia apalagi menggugurkan kajian-kajian para akademisi dan masyarakat pemangku kepentingan lainnya. Sebaliknya, kumpulan tulisan ini lebih tepat dikatakan sebagai kumpulan kajian yang melengkapi kajian-kajian tersebut. Dengan demikian, kumpulan tulisan ini diharapkan dapat mengisi wacana-wacana yang berkembang selama ini. Di atas itu semua, sebagai sub-sistem pendukung keahlian, kumpulan tulisan ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu alternatif *menu for choice* bagi para pengambil keputusan di lembaga DPR RI. Semoga buku ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi pembaca, khususnya bagi segenap anggota parlemen sebagai tempat para penulis melaksanakan debut dedikasinya.

Jakarta, Desember 2010

Penyunting

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	ix

BAGIAN KESATU

ANALISA KEBIJAKAN SUBSIDI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Permasalahan dan Tujuan.....	5
II. KERANGKA PIKIR KONSEPTUAL	6
2.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	6
2.2. Teori Pertumbuhan	6
2.3. Subsidi.....	8
III. METODOLOGI.....	12
3.1. Metode Analisis Data.....	12
3.2. Spesifikasi Model dan Variabel yang digunakan	12
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	12
3.4. Cara Pengumpulan Data.....	13
3.5. Metode Estimasi Data Time Series	13
IV. HASIL PENELITIAN.....	13
4.1. Analisis Subsidi Energi	16
4.2. Analisis Subsidi Non-Energi	18
V. PENUTUP	22
5.1. Kesimpulan.....	22
5.2. Rekomendasi.....	22
DAFTAR PUSTAKA.....	23

BAGIAN KEDUA

ANALISIS RENDAHNYA PENYERAPAN SUBSIDI PAJAK

I. PENDAHULUAN	27
1.1. Latar Belakang.....	27
1.2. Perumusan Masalah	31
1.3. Tujuan Penulisan.....	31
1.4. Kerangka Pemikiran	32
II. METODE PENULISAN	33
III. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
3.1. Sisi Administratif	37
3.2. Sisi Kriteria atau Penilaian Pemerintah	39
IV. PENUTUP	40
4.1. Kesimpulan.....	40
4.2. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43

BAGIAN KETIGA

EKONOMI SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN INDONESIA

I. PENDAHULUAN	49
1.1. Latar Belakang.....	49
1.2. Perumusan Masalah	52
1.3. Tujuan	53
II. KERANGKA TEORITIS DAN PEMIKIRAN.....	53
2.1. Dampak Subsidi Harga Bahan Bakar Minyak terhadap Kesejahteraan Masyarakat	53
2.2. Dampak Subsidi Harga Bahan Bakar Minyak terhadap Kinerja Perekonomian.....	56
2.3. Kerangka Pemikiran	58
III. METODOLOGI.....	59
3.1. Jenis dan Sumber Data	59
3.2. Model Ekonomi	59
3.3. Prosedur Analisis.....	60

IV. PERKEMBANGAN SUBSIDI HARGA BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA	62
4.1. Perkembangan Ekonomi Bahan Bakar Minyak	62
4.2. Perkembangan Ekonomi Subsidi Harga Bahan Bakar Minyak ...	63
4.3. Perkembangan Subsidi Harga Bahan Bakar Minyak di Negara Lain	66
V. DAMPAK KEBIJAKAN SUBSIDI HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN INDONESIA	68
5.1. Hasil Keragaan dan Validasi Model Ekonomi	68
5.2. Hasil Analisis Data	68
VI. PENUTUP	71
6.1. Kesimpulan	71
6.2. Implikasi Kebijakan	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAGIAN KEEMPAT

INSENTIF DAN SUBSIDI DALAM PENGEMBANGAN ENERGI NON- BAHAN BAKAR MINYAK

I. PENDAHULUAN	79
II. PERTUMBUHAN KONSUMSI BBM DAN SUMBER ENERGI LAIN	80
III. PENGERTIAN SUBSIDI DAN INSENTIF	82
IV. ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI DAN INSENTIF BAGI PENGEMBANGAN GAS BUMI, BATUBARA, DAN PANAS BUMI	84
V. KESIMPULAN	93
DAFTAR PUSTAKA	95

BAGIAN KELIMA

ANALISIS KEBIJAKAN SUBSIDI DALAM TARIF LISTRIK

I. PENDAHULUAN	99
1.1. Latar Belakang	99
1.2. Rumusan Masalah	101

1.3. Tujuan Penulisan.....	101
1.4. Metode Penulisan.....	101
II. KERANGKA PEMIKIRAN.....	101
2.1. Pengertian dan Tujuan Subsidi.....	101
2.2. Prinsip Tarif Listrik	102
2.3. Sumber dan Sasaran Penggunaan Subsidi.....	104
III. PEMBAHASAN.....	105
3.1. Subsidi Listrik di Indonesia	105
3.2. Tarif Dasar Listrik	107
3.3. Perkembangan Kebutuhan Listrik di Indonesia	108
3.4. Peran Subsidi Listrik Bagi Konsumen	111
3.5. Sumber Dana Subsidi Listrik.....	113
IV. PENUTUP	114
4.1. Kesimpulan.....	114
4.2. Rekomendasi.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	117

BAGIAN KEENAM

SUBSIDI DAN UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

I. PENDAHULUAN	121
1.1. Latar Belakang.....	121
1.2. Perumusan Masalah	123
1.3. Tujuan Penulisan.....	123
1.4. Kerangka Pemikiran	124
II. METODOLOGI PENELITIAN.....	124
2.1. Metode Analisis Penelitian.....	124
2.2. Teknik Pengumpulan Data	125
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	125
3.1. Kredit UMKM.....	129
3.2. Subsidi Listrik	132
IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	133
4.1. Kesimpulan.....	133
4.2. Rekomendasi.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	135

BAGIAN KETUJUH

PROYEKSI IMPLIKASI PENURUNAN SUBSIDI PUPUK TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI

I. PENDAHULUAN	139
1.1. Latar Belakang Masalah	139
1.2. Metodologi Analisis	141
II. TINJAUAN PUSTAKA	144
2.1. Teori Subsidi	144
2.2. Peran Subsidi bagi Petani	45
2.3. Analisis Dampak Subsidi terhadap Pendapatan Rumah Tangga	146
III. PEMBAHASAN	146
3.1. Perkembangan Subsidi Pupuk di Indonesia	146
3.2. Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Saat Ini	149
3.3. Pengaruh Subsidi Harga Pupuk terhadap Pendapatan Petani	150
IV. PENUTUP	152
4.1. Kesimpulan	152
4.2. Implikasi Kebijakan	153
DAFTAR PUSTAKA	155

BAGIAN KEDELAPAN

URGENSI SUBSIDI PERIKANAN DI INDONESIA

I. PENDAHULUAN	159
1.1. Latar Belakang	159
1.2. Perumusan Masalah	161
1.3. Tujuan Penulisan	162
II. LANDASAN TEORI	162
2.1. Definisi Subsidi	162
2.2. Klasifikasi Subsidi Perikanan	163
2.3. Dampak Subsidi Perikanan di Negara Lain	164
2.4. Kebijakan Subsidi Perikanan di Beberapa Negara	166
III. HASIL DAN PEMBAHASAN	168
3.1. Peran Sektor Perikanan dalam Perekonomian Indonesia	168

3.2. Kondisi Nelayan Indonesia	170
3.3. Subsidi Perikanan dan Dampaknya di Indonesia.....	171
VI. PENUTUP	176
4.1. Kesimpulan.....	176
4.2. Saran.....	176
DAFTAR PUSTAKA.....	179

BAGIAN KESEMBILAN

POLEMIK SUBSIDI PERUMAHAN DI INDONESIA

I. PENDAHULUAN	183
1.1. Latar Belakang.....	183
1.2. Permasalahan.....	186
II. LANDASAN TEORI	186
2.1. Definisi, Teori, dan Bentuk Subsidi Perumahan.....	186
2.2. NPL (<i>Non Performing Loan</i>) dan Jenis Kredit yang disalurkan	189
III. PEMBAHASAN.....	190
3.1. Penyerapan Subsidi Perumahan di Indonesia.....	190
3.2. Kelebihan FLPP dan Dampak yang ditimbulkan	194
3.3. Program Dan Kebijakan Perumahan Tahun 2010-2014	198
IV. PENUTUP	199
4.1. Kesimpulan.....	199
4.2. Saran.....	199
DAFTAR PUSTAKA.....	201

BAGIAN KESEPULUH

BANTUAN LANGSUNG TUNAI SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. PENDAHULUAN	207
1.1. Latar Belakang.....	207
1.2. Permasalahan.....	210
II. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	211
2.1. Program BLT	214
2.2. Tujuan BLT	216

2.3. Sasaran BLT.....	217
2.4. Mekanisme dan Tahap Kegiatan BLT.....	217
2.5. Struktur Organisasi Program BLT.....	219
III. PELAKSANAAN BLT.....	220
IV. PENUTUP.....	222
4.1. Kesimpulan.....	222
4.2. Saran.....	223
DAFTAR PUSTAKA.....	225

BAGIAN KESEBELAS

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL: SISTEM BARU PENDANAAN JAMINAN KESEHATAN INDONESIA

I. PENDAHULUAN.....	229
1.1. Latar Belakang dan Permasalahan.....	229
1.2. Kerangka Teoritik.....	231
II. PEMBAHASAN.....	234
2.1. Jaminan Kesehatan sebelum SJSN.....	234
2.2. Sistem Jaminan Sosial Nasional.....	238
III. KESIMPULAN.....	244
DAFTAR PUSTAKA.....	245
BIOGRAFI PENULIS.....	247

